

# **Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender di Tataran Lokal. Studi Kasus: Upaya Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Komunitas Perempuan Penyintas Kekerasan**

**Stanislaus Risadi Apresian, Sylvia Yazid, Elisabeth S. Dewi**

Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Katolik Parahyangan Bandung

Email: sylvia\_yazid@yahoo.com

## **Abstrak**

Riset ini merupakan studi reflektif yang didanai oleh proyek dari Australia Awards in Indonesia melalui skema Alumni Grant Scheme. Judul proyek ini adalah “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender di Tataran Lokal. Studi Kasus: Upaya Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Komunitas Perempuan Penyintas Kekerasan”. Proyek ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Riset ini memiliki arti penting mengingat angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih cenderung tinggi, bahkan angka kasusnya meningkat pada 2017 jika dibandingkan data pada 2016. Selanjutnya, riset ini juga berfokus kepada poin 5 SDGs, khususnya poin 5.2 yaitu penghapusan seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan serta para gadis baik di ruang public maupun ruang privat. Pertanyaan riset yang akan dijawab melalui riset ini: Pertama, efek dari kekerasan berbasis gender terhadap kondisi sosio-ekonomi dari para perempuan di wilayah Majalaya, Paseh, Arjasari, dan Ciparay; Kedua, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para penyintas kekerasan terhadap perempuan; Ketiga, bagaimana dampak dari pendekatan “social entrepreneurship” terhadap pemberdayaan ekonomi dari para perempuan penyintas kekerasan. Riset ini menggunakan pendekatan studi kasus melalui pemilihan empat desa di kawasan Kabupaten Bandung yaitu Majalaya, Paseh, Arjasari, dan Ciparay sebagai lokasi utama dari riset lapangan ini. Para perempuan dari keempat desa ini tergabung ke dalam sebuah organisasi yang disebut Bale Istri yang diinisiasi oleh Sapa Institut.

Kata kunci: kekerasan berbasis gender, perempuan penyintas kekerasan, social entrepreneurship, Kabupaten Bandung.

## *Abstract*

*This research is a reflective study from a project funded by Australia Awards in Indonesia through Alumni Grant Scheme. The name of the project is “Social and Economic Empowerment of Women Domestic Violence Survivors”. The project took places in Bandung Regency, West Java, Indonesia. This research is important since the cases of violence against women in Indonesia are still high – even the number of the cases increased in 2017 compared to the data in 2016. In addition, this research also focuses on SDGs point 5 particularly point 5.2 to eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres. This research questions: firstly, the impacts of gender-based violence towards the economic and social conditions of the women in Majalaya, Paseh, Arjasari, and Ciparay; secondly, the challenges faced by the women violence survivors; thirdly, how social entrepreneurship impacts on the economic empowerment of the women violence survivors. Case study is utilized as the design of inquiry by selecting four villages in Bandung Regency including Majalaya, Paseh, Arjasari, and Ciparay as main sites of the field research. The women in those four sites are joined in one organization called Bale Istri initiated by Sapa Institute.*

*Keywords: gender-based violence, women violence survivors, social entrepreneurship, Bandung Regency*

## Pendahuluan

Pengarusutamaan kesetaraan gender terus menggemakan baik dalam tataran internasional maupun lokal. Kesetaraan gender (*gender equality*) menjadi salah satu poin penting yang diperjuangkan dalam tataran internasional melalui kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 5. Penghapusan *gender-based violence* adalah agenda prioritas dalam poin kelima ini (UN Women, 2018). *World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa 1 dari 3 perempuan atau sekitar 35% perempuan di dunia ini pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual (World Health Organization [WHO], 2017). Meskipun sudah menjadi agenda dalam SDGs, pengembangan diskursus anti kekerasan berbasis gender sering menemui kendala pada tataran lokal seperti di daerah-daerah pelosok atau pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah, budaya patriarki yang masih mendominasi dan yang masih minim menerima perkembangan informasi.<sup>1</sup> Salah satu akibat dari kurangnya pemahaman kesetaraan gender ini adalah tindakan pelecehan dan bahkan kekerasan yang sering dialami oleh kaum perempuan. Ironisnya,

kasus-kasus tersebut seringkali tidak terselesaikan dengan baik karena korban merasa ketakutan atau malu dengan kejadian yang dialami sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan tentunya menimbulkan dampak negatif bagi perempuan baik secara fisik maupun mental. Dalam kasus tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) faktor ekonomi menjadi alat sekaligus dampak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai alat, pelaku KDRT membatasi atau bahkan tidak memberikan nafkah kepada korban. Sebagai dampak, kasus KDRT yang berakhir dengan perceraian membuat perempuan mengalami permasalahan dalam perekonomian mereka. Selain tidak terbiasa melakukan kegiatan perekonomian secara mandiri, kondisi pasca-KDRT sangat mungkin membuat perempuan-perempuan penyintas mengalami permasalahan psikologis, terutama rendahnya rasa percaya diri untuk dapat menjalani kehidupan secara mandiri, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Dalam beberapa kasus kondisi ini juga terjadi di wilayah-wilayah tertentu di perkotaan yang memiliki kondisi serupa.

Tulisan ini merupakan hasil refleksi dari sebuah kegiatan yang dibiayai oleh Australia Awards in Indonesia melalui Alumni Grant Scheme. Kegiatan yang diberi judul “Social and Economic Empowerment of Women Domestic Violence Survivors” ini dilaksanakan atas kerjasama Center of Excellence for Small and Medium Enterprise and Development, Universitas Katolik Parahyangan dan SAPA Institut. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pembekalan kemampuan manajemen keuangan dan kemampuan dasar berwirausaha melalui pelatihan bagi para perempuan pendamping dan penyintas yang tergabung dalam komunitas-komunitas Bale Istri yang didampingi oleh SAPA Institut di empat desa di Kabupaten Bandung yaitu Majalaya, Paseh, Arjasari, dan Ciparay.

Kegiatan ini didasari oleh adanya kebutuhan di lapangan yang diungkapkan oleh SAPA Institut. Diasumsikan bahwa bila perempuan-perempuan korban dan penyintas KDRT dapat mandiri secara ekonomi, maka kemungkinan untuk mereka keluar dari lingkaran kekerasan akan semakin besar. Secara konseptual, kegiatan ini mengacu pada SDGs poin 5: “Achieve gender equality and empower all women and girls”, khususnya pencapaian target 5.2: “Eliminate all forms of violence against all women and

girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation”. Seperti disebutkan di atas, diharapkan dengan memandirikan perempuan secara ekonomi akan berkontribusi pada jumlah perempuan yang terbebas dari kekerasan.

Kontribusi selanjutnya juga diharapkan pada target 5.5: “Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life”. Indikator yang digunakan dalam SDGs lebih mengacu pada jumlah perempuan yang duduk di parlemen, pemerintah dan posisi manajerial. Dalam kegiatan ini, kami lebih menargetkan pada cakupan yang lebih sempit dan tahapan yang lebih awal, paling tidak bagaimana perempuan dapat menentukan sendiri kegiatan perekonomiannya. Terkait dengan target 5.5 ini adalah target 5.A: “Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws”. SDGs menjadikan kepemilikan lahan sebagai indikator untuk target ini. Kami lebih menargetkan pada kemampuan untuk

melakukan kegiatan ekonomi, khususnya memiliki usaha secara mandiri.

Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan, tim sekaligus melakukan penelitian untuk mendapatkan *lessons learned* dari sebuah upaya untuk memberdayakan perempuan penyintas KDRT yang tergabung dalam komunitas dan didampingi oleh sebuah NGO. Penelitian ini mengkaji upaya masyarakat khususnya para perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dengan berfokus pada potensi dan tantangan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di komunitas perempuan penyintas KDRT. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan jumlahnya masih tinggi dan bahkan angka kekerasan tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, kekerasan pada ranah personal sepanjang tahun 2017 tercatat paling tinggi yaitu sejumlah 335.062 kasus (Komnas Perempuan, 2018). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan CATAHU Tahun 2017 yang mencatat kekerasan di ranah personal sejumlah 245.548 kasus (Komnas Perempuan, 2017).

Penelitian ini berdasar pada tiga pertanyaan utama yaitu: (1). Bagaimana kekerasan yang dialami oleh para perempuan

penyintas di desa Majalaya, Paseh, Arjasari dan Ciparay berdampak pada kondisi perekonomian dan sosial mereka? (2). Apa tantangan yang dihadapi oleh para penyintas dalam upayanya mendapatkan kesetaraan gender khususnya dalam hal partisipasi ekonomi? (3). Bagaimana model kewirausahaan sosial yang diimplementasikan berdampak pada pemberdayaan ekonomi para perempuan penyintas kekerasan?

Tulisan ini terbagi menjadi 6 bagian utama. Bagian selanjutnya menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran. Bagian analisis diawali dengan sub judul yang membahas mengenai dampak kekerasan terhadap para penyintas, kemudian dibahas hubungan antara pemberdayaan ekonomi dan upaya untuk menciptakan nirkekerasan terhadap perempuan. Setelah itu, bagian analisis dilanjutkan dengan pemaparan hasil implementasi model kewirausahaan sosial dan tantangan yang dihadapi. Tulisan ditutup dengan kesimpulan yang akan mengemas semua temuan penelitian termasuk praktik baik dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di keempat desa lokasi penelitian.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain penelitiannya menggunakan studi kasus dengan memilih empat desa sebagai lokasi untuk penelitian lapangan. Data akan dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi yang terpilih dan peran peneliti dalam observasi ini adalah sebagai partisipan dimana status peneliti diketahui oleh pihak-pihak yang diobservasi (Creswell, 2014). Observasi yang dilakukan berupa pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para anggota Bale Istri seperti pelatihan, sosialisasi, kegiatan sehari-hari, dan rapat. Selain itu, peneliti juga berperan melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui serangkaian program *capacity building* selama kurang lebih satu tahun. Tim peneliti selanjutnya melakukan intervensi pemberdayaan ekonomi para penyintas dengan mendampingi perancangan dan usaha penerapan model kewirausahaan sosial. Melalui keterlibatan peneliti secara langsung, dengan implementasi program pemberdayaan ekonomi ini, perkembangan responden dapat diidentifikasi, baik sebelum mendapatkan program pemberdayaan ekonomi maupun sesudah mengikuti

serangkaian kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara mendalam secara tatap muka dan *Focus Group Discussion* (FGD) (Creswell, 2014). Narasumber yang diwawancara yaitu 24 responden dari kelompok Bale Istri yang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kelompok pendamping dan anggota. Wawancara dilakukan melalui tiga tahapan. Untuk tahapan pertama, responden yang diwawancara adalah para pendamping yang berjumlah 13 orang. Pada tahapan kedua, wawancara tatap muka secara mendalam dilakukan dengan melibatkan 11 responden anggota Bale Istri. Tahapan ketiga adalah wawancara dengan seluruh responden yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pendamping dan anggota dengan format FGD. Selain itu, para pendamping dan anggota Bale Istri, perwakilan dari SAPA Institut sebagai LSM yang mendampingi kelompok Bale Istri juga diwawancarai. Metode berikutnya juga melibatkan Pengumpulan data melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal, berita dari koran, laporan dokumen dari Komnas Perempuan, serta laporan dari SAPA Institut.

## Kerangka Pemikiran

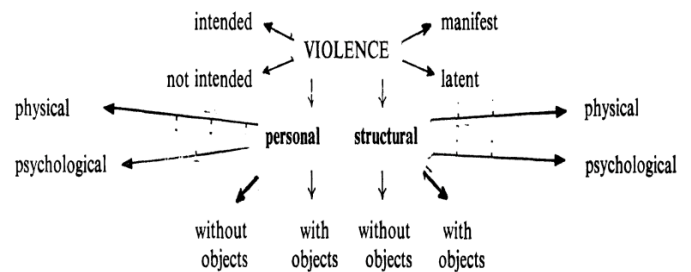
Konsep mengenai kesetaraan gender dapat dipahami dengan menggunakan pendefinisian dari UN Women. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mengacu pada kesetaraan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki serta perempuan. Kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki menjadi sama, melainkan hak, tanggung jawab, dan kesempatan para perempuan dan laki-laki tidak akan tergantung pada apakah mereka terlahir sebagai perempuan atau laki-laki (UN Women, n.d.). Salah satu upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah menghilangkan *gender-based violence*.

Untuk memahami pengertian *gender-based violence*, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep kekerasan. Menurut Dewey (seperti dikutip dalam Scriver, 2015), Kekerasan secara klasik dapat didefinisikan sebagai tindakan secara sengaja menggunakan senjata untuk melukai atau membunuh. Tentunya definisi kekerasan klasik ini tidak bisa menjelaskan fenomena kekerasan personal yang dialami oleh perempuan dalam lingkup rumah tangga karena luka yang diderita tidak selalu dalam bentuk luka secara fisik. Oleh karena itu, definisi kekerasan memerlukan pendefinisian yang lebih luas dengan menyesuaikan bentuk

kekerasan berikut dampaknya yang berkembang di masyarakat pada saat ini.

Untuk memahami konsep kekerasan yang lebih luas, tipologi kekerasan menurut Johan Galtung sangat relevan untuk diaplikasikan dalam penelitian ini. Sebagai gambaran umum, tipologi kekerasan menurut Galtung dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.

Gambar 1. Tipologi Kekerasan Menurut Johan Galtung



Sumber: Johan Galtung, *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3 (1969)

Melalui gambar tersebut, Johan Galtung memberikan pendefinisian kekerasan yang lebih luas dengan memasukkan dua bentuk kekerasan: fisik dan non-fisik. Hal ini membuat tindakan verbal yang dapat melukai perempuan secara psikologis juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan.

Selanjutnya, Galtung juga mengkategorikan kekerasan menjadi dua yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Menurut Galtung (1969), kekerasan personal adalah jenis kekerasan di

mana ada aktor yang melakukan kekerasan atau disebut juga dengan kekerasan langsung, sedangkan kekerasan struktural adalah kekerasan di mana tidak ditemukan aktor yang melakukan kekerasan atau disebut juga dengan kekerasan tidak langsung. Menurut Galtung (1969), kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya secara jelas adalah sebuah kasus kekerasan personal.

Definisi yang serupa digunakan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU). Komnas Perempuan (2018) dalam CATAHU juga menggunakan istilah kekerasan personal yang dialami oleh perempuan sebagai bentuk kekerasan yang pelakunya memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, atau kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Melalui definisi tersebut, Komnas Perempuan menjabarkan dengan spesifik dan jelas terkait aktor dalam kekerasan ranah personal tersebut.

Raab mendefinisikan *gender-based violence* secara lebih spesifik dan sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Menurut Raab, “Violence is the deliberate use of force or power to hurt someone. Hence, gender-based violence is the use of power to enforce gender norms”

(Raab, 2012, hal. 5). Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan yang disengaja untuk menyakiti seseorang dan *gender-based violence* adalah penggunaan kekuatan untuk mendesak atau memaksakan norma-norma gender. Raab juga memberikan contoh bahwa seorang suami mungkin melakukan kekerasan terhadap istrinya karena masyarakat di sekitarnya mendorongnya untuk mempercayai bahwa laki-laki harus “mendisiplinkan” perempuan yang tidak patuh terhadap laki-laki (Raab, 2012).

Dalam upaya mendukung pemberdayaan ekonomi para penyintas, tim peneliti telah berupaya untuk mengaplikasikan model kewirausahaan sosial. Konsep Kewirausahaan Sosial merupakan konsep interdisipliner yang digunakan pada bermacam-macam disiplin ilmu yang berbeda-beda seperti sosiologi, psikologi, bisnis, hingga sosial politik. Konsep ini pada mulanya diperkenalkan oleh William (Bill) Drayton, pendiri dari organisasi Ashoka dan dikenal sebagai bapak Kewirausahaan Sosial. Dalam tulisan ini konsep mengenai kewirausahaan sosial akan menggunakan definisi dari Drayton. Menurut Drayton, kewirausahaan sosial merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh praktisi kewirausahaan yang hadir dengan ide

baru untuk menyelesaikan tekanan dari permasalahan sosial dan mengganti ide lama yang dulunya berpengaruh; mereka kreatif dan memiliki tujuan; bertekad untuk menyebarkan ide tersebut di luar lingkaran mereka sendiri; selain itu mereka juga sangat etis. Melalui konsep kewirausahaan sosial ini, tim peneliti bekerjasama dengan Sapa Institut mencoba untuk mendorong para penyintas untuk berwirausaha dalam kelompok dengan harapan pemberdayaan ekonomi melalui model ini dapat menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi yaitu kekerasan terhadap perempuan serta ketidaksetaraan gender pada tataran lokal khususnya masyarakat pedesaan.

### **Kekerasan dan Dampaknya terhadap Para Perempuan Penyintas di Komunitas Bale Istri**

Bale Istri merupakan sebuah komunitas yang diinisiasi oleh masyarakat dan digerakkan oleh perempuan. Komunitas ini berfungsi sebagai pusat layanan komunitas untuk pendidikan, informasi, komunikasi dan pendampingan perempuan (Sapa Institut, n.d.). Bale Istri ini didampingi oleh Sapa Institut sebagai LSM yang bergerak pada isu perempuan seperti hak seksual, kesehatan reproduksi, kemandirian

ekonomi perempuan, dan anti kekerasan (Sapa Institut, n.d.). Komunitas Bale Istri ini terdiri dari anggota dan pendamping. Meskipun salah satu tujuan dari Bale Istri ini untuk mendampingi para perempuan penyintas kekerasan, namun tidak semua anggotanya merupakan penyintas. Ada anggota yang bukan merupakan penyintas namun tertarik ikut komunitas Bale Istri karena kegiatannya yang dipandang positif mendukung pemberdayaan perempuan.

### *Jenis Kekerasan yang Dialami*

Berdasarkan wawancara tatap muka secara mendalam dengan 23 responden yang terbagi menjadi 12 pendamping dan 11 anggota Bale Istri, dapat diidentifikasi jenis-jenis kekerasan fisik dan non-fisik yang dialami oleh sebagian responden. Secara garis besar, kekerasan non-fisik lebih banyak dialami oleh para responden dibandingkan dengan kekerasan fisik. Semua kekerasan yang dialami responden merupakan kekerasan dalam ranah personal. Dari 23 responden yang berhasil diwawancarai, didapatkan data yaitu: 2 responden mengalami kekerasan fisik, 10 responden mengalami kekerasan non-fisik, 8 responden mengaku belum pernah mengalami kekerasan dalam ranah personal, dan 3 responden tidak memberikan tanggapan.



Jenis kekerasan non-fisik yang dialami antara lain kekerasan verbal, perselingkuhan, penelantaran secara ekonomi, eksploitasi secara ekonomi di mana istri yang bekerja dan suami mengambil hasil dari pekerjaan istri, serta pembatasan kegiatan istri oleh suami secara sepihak. Kekerasan non-fisik ini menimbulkan luka atau kerugian secara psikologis bagi para perempuan tersebut.

#### *Penyebab Kekerasan yang Dialami Oleh Perempuan*

Para responden mengidentifikasi beberapa penyebab utama mengapa perempuan masih mengalami kekerasan khususnya dalam rumah tangga. *Pertama*, ketergantungan terhadap peran suami. Para perempuan yang tidak bekerja atau tidak mandiri secara ekonomi terpaksa harus bergantung pada suami. Ketergantungan ini membuat posisi suami menjadi lebih berkuasa dan merasa dapat bertindak semena-mena termasuk tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik. *Kedua*, belum semua perempuan memahami bahwa KDRT adalah suatu pelanggaran dan dapat diperkarakan dalam ranah hukum. Hal ini membuat banyak kasus tidak dilaporkan sehingga melanggengkan praktek KDRT. Sebagian responden baru mengetahui tentang KDRT dan konsekuensinya setelah

bergabung dengan Bale Istri. *Ketiga*, para responden menganggap para suami sebagai pemimpin dan tidak berani untuk menentang apapun yang dilakukan oleh suami. *Keempat*, laki-laki dianggap lebih kuat secara fisik dan menganggap perempuan lemah secara fisik dan tidak berdaya ketika terjadi KDRT. Stereotip perempuan sebagai makhluk yang lemah ini bahkan muncul sendiri dari sebagian besar responden dan mereka menganggap diri mereka lemah sebagai perempuan secara fisik. *Kelima*, keterbatasan informasi mengenai apa itu kesetaraan gender dan kurangnya sosialisasi terkait KDRT sebagai suatu tindak kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. *Keenam*, kurangnya pendidikan formal yang dirasakan oleh perempuan. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa para perempuan di desa seringkali menikah muda dan tidak melanjutkan sekolah hingga tingkat yang lebih tinggi seperti SMP atau SMA. Kurangnya pendidikan juga diidentifikasi oleh beberapa responden sebagai penyebab masih rentannya perempuan terkena kasus KDRT.

#### *Dampak Kekerasan Terhadap Para Perempuan Penyintas*

Kekerasan yang dialami oleh para perempuan baik fisik maupun non-fisik

tentunya berdampak negatif terhadap kondisi para perempuan bahkan terhadap perkembangan anak-anak mereka. Dari hasil wawancara dengan responden, peneliti telah mengidentifikasi dampak-dampak yang dirasakan oleh para penyintas di komunitas Bale Istri pasca-KDRT. Dampak-dampak tersebut antara lain:

- kondisi psikis yang labil, selalu merasakan kesedihan, malu, tidak percaya diri, tidak bersemangat, frustrasi, dan enggan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;
- pandangan negatif oleh sebagian masyarakat terhadap para perempuan penyintas yang kemudian menjadi janda. Hal ini menyebabkan para perempuan penyintas enggan untuk bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;
- kondisi trauma ketika melihat sosok laki-laki;
- kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar, apalagi pasca ditinggal suami, pihak istrilah yang kemudian merawat anak juga; dan
- emosi anak menjadi tidak stabil (dampak tidak langsung). Ibu juga menjadi mudah emosi ke anak ketika anak berbuat kesalahan. Selain itu,

anak terancam putus sekolah karena perekonomian keluarga yang tidak menentu setelah terjadi perceraian.

Dari sejumlah dampak yang diungkapkan di atas terlihat cukup dominannya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh KDRT. Oleh karena itu, kegiatan memotivasi perempuan-perempuan penyintas untuk melakukan kegiatan ekonomi, selain potensial untuk mengatasi permasalahan finansial, juga akan mendorong mereka untuk membangun kepercayaan diri untuk melakukan interaksi sosial dan sebaliknya.

### **Kemandirian Ekonomi dan Nirkekerasan Terhadap Perempuan**

Menghilangkan *gender-based violence* sebagai salah satu prioritas poin kesetaraan gender dalam kerangka SDGs dapat didorong salah satunya melalui upaya pemberdayaan ekonomi. Kemandirian ekonomi adalah suatu kondisi yang harus dimiliki oleh setiap perempuan agar dapat terlepas dari ketergantungan mutlak terhadap pasangannya. Kondisi ketergantungan tersebut seringkali memposisikan perempuan berada pada posisi yang lemah dan sebaliknya pihak suami yang lebih berkuasa. Kecenderungan ini terkadang digunakan

sebagai legitimasi untuk melakukan tindak kekerasan.

Kemandirian ekonomi juga dapat memposisikan para perempuan sejajar dengan laki-laki dalam hal kesempatan melakukan kegiatan ekonomi. Kemandirian ekonomi ini sangat diperlukan khususnya oleh para perempuan penyintas kekerasan yang bercerai atau berpisah dengan pasangannya. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar perempuan penyintas kekerasan mengalami masa-masa sulit secara ekonomi pasca perceraian. Kesulitan ekonomi terbesar pasca perceraian adalah saat harus memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan kesulitan biaya menyekolahkan anak.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 23 responden, semuanya setuju bahwa kemandirian ekonomi sangat penting bagi perempuan supaya terhindar dari tindak kekerasan. Namun, ketika diberikan pertanyaan apakah para responden sudah merasa mandiri, mereka sedikit kesulitan untuk menjawab. Jawaban yang diperoleh cukup beragam, mulai dari yang menyatakan secara tegas bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomi, hingga yang menjawab sudah mandiri tetapi kadang masih memerlukan bantuan, serta ada yang mengaku belum mandiri secara ekonomi.

Mayoritas dari para responden menjawab sudah merasa mandiri tetapi kadang masih memerlukan bantuan.

Agar dapat mandiri secara ekonomi, tentunya para perempuan harus memiliki sumber penghasilan sendiri. Hampir seluruh responden memiliki usaha pribadi yang dikembangkan, namun menemui banyak sekali kendala dalam mengembangkan usaha yang mereka rintis. Perlu menjadi catatan bahwa usaha yang dilakukan oleh para responden adalah usaha mikro dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Bank Indonesia, 2008).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha masing-masing responden dapat dirangkum sebagai berikut:

- Banyak saingan usaha, sebagian besar usaha yang dilakukan oleh para responden dengan masyarakat sekitar hampir sama seperti usaha membuka warung kelontong, jasa kredit barang (perabot rumah, alat dapur, sprei, dan pakaian), dan makanan ringan (keripik, rengginang, seblak). Mereka menganggap dengan banyaknya penjual yang menjual komoditas yang

sama akan menurunkan pendapatan mereka.

- Kurangnya modal. Responden merasa perlu menambah modal untuk mengembangkan usaha, namun seringkali kesulitan untuk menemukan akses mendapatkan modal usaha tersebut.
- Tidak memiliki kemampuan pemasaran. Para responden merasa bisa melakukan proses produksi tetapi mengalami kesulitan untuk menjual produk mereka karena mereka hanya terpaku pada target pasar di sekitar mereka saja. Sementara itu, mengacu pada kendala pada poin pertama, produsen dengan komoditas yang sama juga banyak ditemui di sekitar daerah mereka.
- Praktek pembukuan keuangan yang buruk. Sebagian besar responden mengaku bahwa keuangan usaha dan keluarga tercampur. Ketika ada kebutuhan keluarga yang mendesak, biasanya para responden langsung mengambil uang usaha mereka tanpa ada pencatatan yang jelas sehingga tidak diketahui berapa modal, berapa keuntungan, atau berapa kerugian yang dialami. Selain itu, para responden juga tidak melakukan

perhitungan dengan baik berapa modal yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Misalnya, untuk membuat kue basah, seringkali biaya berupa transportasi untuk membeli bahan baku, gas untuk memasak, atau tenaga yang mereka keluarkan tidak dihitung dengan baik. Pada akhirnya mereka tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usahanya karena menjual produk terlalu murah.

- Masih sering dijumpai praktek hutang Konsumen dari para responden diketahui ada yang menghutang dalam jangka waktu yang lama sehingga perputaran uang usaha menjadi lambat sehingga menyebabkan usaha para responden tidak berkembang. Bahkan ada salah satu kasus dari responden yang usaha rengginang, ada pemasok yang mengambil barang responden dengan jumlah nilai jutaan pada akhirnya tidak dibayar.
- Kurangnya keterampilan. Sebagian besar dalam mengembangkan usaha seperti usaha keripik atau kue basah dilakukan melalui proses coba-coba sehingga mereka merasa belum mampu membuat inovasi atau

memberikan nilai tambah baru pada produk yang mereka produksi.

Berdasarkan temuan di atas terlihat bahwa kendala yang dihadapi masih berkisar pada kendala pelaksanaan kewirausahaan yang paling umum dan mendasar. Dalam hal ini, karena pelaku usaha adalah perempuan dan sebagian adalah penyintas KDRT, kendala-kendala tersebut menjadi semakin kompleks. Hambatan dari lingkungan sosial juga cukup kental baik itu berupa stereotip maupun praktek buruk dalam melakukan transaksi ekonomi.

### **Upaya Penerapan Model Kewirausahaan Sosial Untuk Para Penyintas**

Proses implementasi program pengembangan kapasitas berlangsung hampir selama satu tahun dengan tiga kali *workshop* dan tiga kali FGD. Materi-materi yang telah diberikan antara lain adalah Gender dan Kepemimpinan Perempuan, Literasi Keuangan, Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Usaha, Pengantar Kewirausahaan, Teknik Fasilitasi untuk Pendamping, dan *Self-Leadership*. Selain itu, tim CoE-SMED, Sapa Institut dan perwakilan dari Bale Istri juga telah merancang sebuah model kewirausahaan

sosial untuk diterapkan oleh para anggota Bale Istri.

Dalam prakteknya, model kewirausahaan sosial dengan melibatkan para anggota Bale Istri dari keempat desa untuk membuat usaha bersama masih menemui banyak kendala. Pada perkembangannya, para anggota tetap memilih melakukan usaha pribadi masing-masing. Berdasarkan hasil FGD dengan kelompok pendamping maupun kelompok anggota, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh para perempuan tersebut dalam menerapkan model kewirausahaan sosial. Kendala-kendala yang dimaksud antara lain:

- Modal menjadi permasalahan yang diungkapkan lagi oleh para pendamping, karena tidak ada modal oleh karena itu upaya melakukan usaha bersama dalam kerangka kewirausahaan sosial belum berjalan. Hanya sebatas ide atau wacana tetapi belum dapat diimplementasikan.
- Pendamping Bale Istri sebagai motor penggerak untuk membangun usaha bersama belum merasa percaya diri untuk mengajak rekan yang lain karena merasa belum sukses dalam menjalankan usaha pribadi. Bahkan ada ungkapan bahwa mengembangkan usaha sendiri saja

masih jalan di tempat, bagaimana mau mengajak anggota yang lain untuk membuat usaha bersama.

- Pola pikir para anggota Bale Istri yang masih menganggap “pelatihan” sama dengan “pemberian modal” membuat sebagian anggota kurang antusias untuk berlanjut mengembangkan usaha bersama dalam kerangka kewirausahaan sosial ini. Sebagian besar masih mengira atau berharap mendapatkan modal ketika mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh peneliti. Ada sebagian yang mengungkapkan kekecewaan karena ternyata tidak mendapatkan modal dari pelatihan yang diselenggarakan oleh tim peneliti. Bahkan ada cerita para pendamping Bale Istri dianggap mengambil modal dari pelatihan yang diselenggarakan dan membuat usahanya sendiri. Padahal kenyataannya tidak seperti itu.
- Preferensi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sendiri lebih besar dibandingkan dengan membentuk usaha bersama. Hal ini terbukti dari pengalaman beberapa wilayah yang pernah mendapatkan modal dari Kementerian Sosial untuk

perempuan mantan buruh migran. Dana yang diterima sebesar 5 juta untuk anggota komunitas, namun mereka lebih memilih mengembangkan usaha pribadi. Pemberian dana juga tidak ke semua wilayah, namun hanya beberapa wilayah yang dipilih dengan mekanisme dari Kementerian Sosial sendiri. Dalam kasus terakhir, hanya Desa Ciparay yang mendapatkan bantuan modal usaha ini. Hal ini kemudian menimbulkan kecemburuan karena ada kelompok Bale Istri di desa lainnya yang tidak mendapat bantuan modal.

- Dari sisi pendampingan, kewirausahaan sosial memerlukan kehadiran pendamping. SAPA Institut merupakan LSM yang hadir dengan ide pemberdayaan ekonomi perempuan dan berupaya menyebarkan diskursus kesetaraan gender dikalangan masyarakat luas. Dalam implementasinya SAPA Institut masih menemui tantangan karena masih minimnya jumlah sumber daya manusia yang dapat turun langsung ke masyarakat mengingat lokasi dari keempat desa relatif jauh.

## Kesimpulan

Tulisan ini merupakan refleksi dari penelitian yang dilaksanakan bersamaan dengan sebuah program pemberdayaan perempuan yang dibiayai oleh pemerintah Australia. Program tersebut ditujukan untuk berkontribusi dalam pencapaian poin ke 5 dari SDGs yaitu “Achieve gender equality and empower all women and girls”. Dari pengamatan dan pengalaman selama pelaksanaan program ini dapat dilihat bahwa: Pertama, upaya pemberdayaan akan semakin kompleks ketika perempuan target adalah mereka yang memiliki permasalahan tambahan seperti pernah atau sedang mengalami KDRT. Oleh karenanya, perlu ada penyesuaian indikator yang ditetapkan dalam SDGs dengan menurunkannya ke dalam indikator-indikator yang lebih mungkin dicapai pada level dan kondisi tertentu. Kedua, pengalaman dalam upaya pemberdayaan ini semakin menunjukkan pentingnya *base-line study* atau pengumpulan informasi awal sebelum memutuskan upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi sebuah masalah. Kegiatan yang kami lakukan telah didahului dengan survey, FGD, dan informasi dari LSM yang selama ini mendampingi. Dalam pelaksanaannya, tetap diperlukan penyesuaian-penyesuaian merespon pada

kondisi yang ada. Terlepas dari kendala-kendala tersebut, asumsi utama yang mendasari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini dapat dikonfirmasi. Dalam FGD terakhir dengan anggota komunitas Bale Istri dapat diidentifikasi sejumlah perubahan yang mengindikasikan peningkatan kepercayaan diri dan motivasi terutama dalam bidang ekonomi.

## Daftar Pustaka

- Bank Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/.../UU20Tahun2008UMKM.pdf>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Quantitative, Qualitative, and Mixed Method Approach*. California, United States of America: SAGE Publications Inc.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education. An introduction to the philosophy of education*. New York, United States of America: Free Press, 1916). Quoted in S. Scriver et.al. (2015). *Conceptualising Violence: A Holistic Approach to Understand Violence Against Women and Girls. WhatWorks Working Paper*.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research, Vol. 6*.

- Komnas Perempuan. (2018). *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*. Diakses dari [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf).
- Komnas Perempuan. (2017). *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*. Diakses dari [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf).
- Raab, M. (2012). *Ending Violence Against Women: An Oxfam Guide*. Diakses dari [http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA\\_Guide\\_2017.pdf](http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf).
- Sapa Institut. (n.d.) *Bale Istri*. Diakses dari <https://sapainstitut.or.id/bale-istri/>.
- Sapa Institut. (n.d.) *Profil Sapa*. Diakses dari <https://sapainstitut.or.id/profil-sapa/>.
- UN Women. (n.d.) *SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls*. Diakses dari <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality>.
- World Health Organization. (2017). *Violence Against Women*. Diakses dari <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>.